



LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN TAHUN 2024



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN
KABUPATEN SLEMAN**

KATA PENGANTAR

Laporan penanganan pengaduan ini dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan mengenai perizinan di Kabupaten Sleman. Laporan yang disampaikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman adalah aspirasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Aduan dari pemohon atau warga masyarakat adalah masukan tak ternilai bagi penyelenggara pelayanan publik khususnya pelayanan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman

Rekapitulasi laporan penanganan pengaduan baik permasalahan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan maupun permasalahan yang bersifat umum akan diberikan tanggapan sesuai kanal aduan baik berupa surat, datang langsung, kotak saran, telepon, maupun media online. Namun apabila pengaduan tersebut perlu ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan instansi terkait maka akan dikoordinasikan dengan instansi terkait. Selanjutnya harapan kami semua permasalahan yang ada dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Instansi terkait untuk mencari solusi yang terbaik.

Dalam laporan penanganan pengaduan ini tidak hanya terkait permasalahan keberatan dari masyarakat tetapi juga ada yang sifatnya konsultasi dan informasi terkait proses perizinan yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman. Dengan adanya langkah tersebut, perizinan di Kabupaten Sleman diharapkan kedepannya akan menjadi lebih baik dan proses perizinan menjadi mudah dipahami oleh masyarakat selaku pemohon izin.

Demikian laporan ini disusun, semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Sleman, 2 Januari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Retno Susiati, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda; IVc

NIP. 19650412 199003 2 0112

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
PENGELOLAAN PENGADUAN PERIZINAN TAHUN 2024.....	
I Pendahuluan:.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	1
C. Dasar Hukum.....	1
II Kanal Pengaduan.....	2
III Tahapan Pengelolaan Pengaduan.....	2
IV Tindak Lanjut Pelayanan Pengaduan.....	3
V Hasil Monitoring dan Evaluasi.....	3
VI Tindak Lanjut atas Hasil Monitoring dan Evaluasi.....	4
VII Kesimpulan.....	4
 REKAPITULASI DATA ADUAN TAHUN 2024.....	 5
 REKAPITULASI JUMLAH ADUAN TAHUN 2024.....	 6
A. Aduan melalui Lapor Sleman	6
B. Aduan melalui Website DPMPTSP	11
C. Aduan melalui Email DPMPTSP	18
D. Aduan melalui Website/email Pemerintah Kabupaten Sleman..	21
E. Aduan melalui Media SP4N.....	21
F. Aduan melalui Media Datang Langsung.....	21
G. Aduan melalui Media Surat Masuk.....	22
H. Aduan melalui Media Kotak Saran	23
I. Aduan melalui Media Telepon.....	24

LAPORAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penerapan Undang Undang keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman telah melakukan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat terhadap berbagai kanal pengaduan.

Keterbukaan informasi publik, penanganan pengaduan sebagai bagian dari pelayanan publik, dan pencanangan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman merupakan upaya mendukung terwujudnya pelayanan publik yang bebas korupsi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman menyadari perlunya tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap pelaksanaan pelayanan publik, baik petugas pelayanan maupun sistem penanganan pengaduan.

B. Tujuan:

Maksud dan tujuan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan pengaduan dan untuk menilai dan mengevaluasi penyelesaian tindak lanjut atas pengaduan masyarakat. dan pelaksanaan pencapaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Kelompok Substansi Pelayanan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman.

C. Dasar Hukum:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
2. Peraturan Bupati Sleman Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar pelayanan Pengaduan Perizinan

3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas.
4. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengaduan Nomor 067/1946 tanggal pembuatan 19 September 2015, tanggal revisi 19 Februari 2018, dan tanggal efektif 19 Februari 2018

II. Kanal pelayanan pengaduan

- a. Telepon : (0274) 867199, (0274) 868405 psw 7374, 7388, 7375
- b. Fax : (0274) 866501
- c. Website : <https://dpmptsp.slemankab.go.id>
- d. Email : dpmptsp@slemankab.go.id
- e. Twitter : @dpmptsp sleman
- f. IG : @dpmptsp sleman
- g. Facebook : @dpmptsp sleman
- h. Lapor sleman : link laporsleman <https://lapor.slemankab.go.id>
- i. Lapor SP4N : link lapor SP4N <https://www.lapor.go.id>
- j. WA Konsultasi//Informasi Izin : 089692886200/
- k. WA Aduan : 081326109494
- l. Surat : DPMPTSP Kab Sleman, Jl. Magelang KM 11 Beran Lor Tridadi Sleman
- m. Kotak saran : DPMPTSP Kab Sleman, Jl. Magelang KM 11 Beran Lor Tridadi Sleman
- n. Datang langsung : DPMPTSP Kab Sleman, Jl. Magelang KM 11 Beran Lor Tridadi Sleman dengan mengisi form pengaduan yang telah disediakan atau menyampaikan aduan ke petugas.
- o. media sosial Pemerintah Kabupaten Sleman yang kemudian akan diteruskan ke admin pengaduan di DPMPTSP Kabupaten Sleman.

III. Tahapan pengelolaan pengaduan:

Tahapan pelaksanaan pengelolaan pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :

1. masyarakat menyampaikan pengaduan perizinan ke DPMPTSP Kabupaten Sleman sesuai dengan jenis pengaduan;
2. Pengaduan diterima oleh petugas Kelompok Substansi Pelayanan Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Sleman;
3. Petugas/Staf Kelompok Substansi Pelayanan Pengaduan mengumpulkan data dan informasi;
4. Ketua Tim Kerja Pelayanan Pengaduan menelaah, mengklasifikasi, dan memprioritaskan penyelesaian pengaduan;
5. dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan DPMPTSP Kabupaten Sleman, pengaduan disalurkan kepada perangkat daerah terkait atau pemangku wilayah setempat (Kapanewon/Kalurahan);
6. Ketua Tim Kerja Pelayanan Pengaduan melakukan analisa terhadap data dan informasi yang diterima, dengan melibatkan instansi teknis;

- 7. Ketua Tim Kerja Pelayanan Pengaduan bersama Instansi Teknis melakukan pengecekan lokasi, apabila diperlukan;
- 8. Kepala DPMPTSP Kabupaten Sleman melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis dalam pengambilan keputusan, apabila diperlukan;
- 9. Kepala DPMPTSP Kabupaten Sleman memberikan jawaban/tanggapan atas aduan masyarakat secara tertulis;
- 10. Petugas menyampaikan informasi dan/atau tanggapan kepada pengadu dan/atau pihak terkait
- 11. Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pengelolaan pengaduan;
- 12. Ketua Tim Kerja Pelayanan Pengaduan menyampaikan kepada atasan terkait aduan yang memerlukan tindaklanjut penanganan pengaduan
- 13. Pengelolaan Pengaduan akan dibuat rekapan laporan sebagaimana terlampir.

IV. Tindak lanjut pelayanan pengaduan

Dalam rangka tindaklanjut penanganan pengaduan, Ketua Tim Kerja Pelayanan Pengaduan membuat laporan terkait pengaduan yang ada dan menyampaikan agar masukan dari aduan yang ada diinformasikan kepada seluruh penyelenggara layanan, dalam hal ini seluruh staf DPMPTSP Kabupaten Sleman pada saat apel pagi, rapat koordinasi internal staf, rapat koordinasi struktural, perbaikan dan pengembangan sistem pelayanan, perbaikan fasilitas sarana pelayanan dalam rangka perbaikan pelayanan.

V. Hasil Monitoring dan Evaluasi:

asil laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan sampai dengan akhir Tahun 2024 sebanyak 69 aduan dari berbagai kanal, dan 19 permohonan pengurangan/keringanan/pembebasan retribusi /sanksi administrasi dengan perincian sebagai berikut:

NO	MEDIA	OKTOBER		KETERANGAN
		MASUK	TINDAK LANJUT	
1	SURAT	7	7	Koordinasi dengan dinas terkait dan/atau memberikan tanggapan melalui surat
2	LAPOR SLEMAN	9	9	
3	LAPOR SP4N/PRESIDEN	0	0	
4	MEDSOS DPMPTSP	45	45	
5	MEDSOS PEMKAB	2	2	
6	DATANG LANGSUNG	5	5	
7	TELEPON	0	0	Ditindak lanjuti dengan perbaikan layanan
8	KOTAK SARAN	1	1	

				atau menghubungi kontak pengadu apabila mencantumkan nomor kontak yang bisa dihubungi
9	retribusi	19	19	Semua permohonan telah dikoordinasikan dengan tim yang teridi dari DPMPTSP, BKAD, Inspektorat, DPUPKP, Bagian Hukum) dan telah diberikan keputusan

VI. Tindak lanjut atas Hasil Monitoring dan Evaluasi
Tindak lanjut laporan monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat Tahun 2024 sebagaimana terlampir:

VII. Kesimpulan:

Dari pengaduan masyarakat yang masuk telah dilakukan evaluasi setiap bulannya terutama pengaduan dari media sosial, dan web sudah langsung bisa ditindaklanjuti dengan diberikan tanggapan.

Untuk aduan melalui surat membutuhkan waktu tindak lanjut yang lebih lama karena tidak dapat diselesaikan dalam 1 rapat koordinasi.

REKAPITULASI DATA ADUAN TAHUN 2024

NO	MEDIA	SISA	JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPT		OKT		NOP		DES		JUMLAH	
		2023	MASUK	TL	MASUK	TL	MASUK	TL	MASUK	TL	MASUK	TL	MASUK	TL	MASUK	TL	MASUK	TL	MASUK	TL	MASUK	TL	MASUK	TL	MASUK	TL	MASUK	TL
1	SURAT		3	2	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	7	7
2	LAPOR SLEMAN		5	5	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	
3	LAPOR SP4N/PRESIDEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	9	9
4	MEDSOS DPMPTSP		8	8	5	5	4	4	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEDSOS PEMKAB		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45	
6	KOTAK SARAN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
7	DATANG LANGSUNG		2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
8	TELEPON		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5	5
	Jumlah		18	17	9	8	4	6	4	4	3	3	6	6	2	2	3	3	4	4	7	7	5	5	4	4	0	0
1	RETRIBUSI	1	0	1	0	0	1	0	0	1	2	2	3	2	3	2	4	3	1	3	1	1	1	2	2	19	19	

MEDSOS PEMKAB SLEMAN: EMAIL, WEBSITE, IG, FB, TWITTER

MEDSOS DPMPTSP: EMAIL, WEBSITE, IG, TWITTER, FB

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman



RETNO SUSIATI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda; Ivc
NIP. 19650412 199003 2 0112

REKAP ADUAN DPMPPTSP KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024

NO	TANGGAL	PENGADU	Email/Telp	TOPIK	INFORMASI ADUAN	TANGGAPAN/KETERANGAN	WAKTU PENYELESAIAN	OPD TERKAIT	STATUS PENYELESAIAN
A	LAPOR SLEMAN								
1	13 Januari 2024	anonymous	Pukul : 2024-01-30 14:40:44 Pelapor : HAFIEDZ AULIA PHD Akun : Email : hafiedzauliaphd@gmail.com Telepon : 082221320744 Alamat : Mhytic Billiard Jogja Panggung Sari, Sariharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman	Judul : Tidak Ada Perizinan Berusaha Padahal Sudah Cukup Lama Beroperasi	Tolong Pemerintah Kabupaten Sleman Terkhusus Dinas Perizinan Kabupaten Sleman Untuk Menindaklanjuti Mengenai Perizinan Berusaha Billiard, Ditemukan Bahwa Usaha Tersebut Belum Memiliki Izin Resmi Yang Diterbitkan Sesuai Dengan Peraturan Kabupaten Sleman Padahal Sudah Cukup Lama Beroperasi. Saya Berharap Agar Pengusaha-pengusaha Yang Berada Di Kabupaten Sleman Mengindahkan Peraturan Yang Sudah Ditetapkan Di Pemerintah Kabupaten Sleman Agar Selalu Tertib Dan Kondusif. Mhytic Billiard Jogja Panggung Sari, Sariharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman Mohon memberikan tindak lanjutnya, matur nuwun atas kerjasamanya.	Terimakasih. Aduan tersebut sudah kami koordinasikan dengan pihak di DPMPPTSP. 1. Untuk melakukan pengecekan perizinan, kami butu data penanggungjawab. 2. Jika yang bersangkutan merasa terganggu dengan masalah ketenteraman dan ketertiban umum, aduan tersebut dapat diteruskan ke SATPOLPP Kabupaten Sleman. Terimakasih.	1 Hari (14 Januari 2024	DISKOMINFO DPMPPTSP	sudah ditindaklanjuti
2	23 Januari 2024	anonymous	ID Laporan : 7815 Pukul : 2024-01-19 10:39:54 Pelapor : Suryo Akun : Email : suryapras28@gmail.com Telepon : 085865163725 Alamat : Alamat : Maps ATV Kaliurang Jl. Tlogo Putri Kaliurang Timur, RT.06RW.15, Kaliurang, Hargobinangun, Kec. Pakem, Kabupaten Sleman	Judul : Perizinan Trip ATV Di Lokasi Kaliurang	Selamat Siang Mau Bertanya, Terkait Perizinan Persewaaan ATV Beserta Program Road Trip Nya, Yaitu Alamat : Maps ATV Kaliurang Jl. Tlogo Putri Kaliurang Timur, RT.06RW.15, Kaliurang, Hargobinangun, Kec. Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55582. Apakah Usaha Ini Ada Izin Nya Dan Jika Sudah Ada Apakah Masih Berlaku Untuk Masa Ijin Nya, Karena Saya Tanyakan Tadi Terkait Asuransi Juga Tidak Menyediakan, Dan Mereka Dengan Arogan Dan Merasa Percaya Diri Dengan SOP Yang Mereka Punya, Hal Ini Saya Utarakan Karena Usaha Mereka Yang Bersifat Outdoor Dan Terkait Juga Dengan Becana Alam Yang Sedang Terjadi Di Beberapa Wilayah Khususnya Didaerah Dataran Tinggi Atau Pegunungan.	Setelah kami koordinasikan dengan pimpinan di DPMPPTSP, kami disarankan untuk menyampaikan kepada Dinas KOMINFO agar aduan tersebut diteruskan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman sebagai pengawas dan pembina usaha sektor pariwisata dan sebaiknya juga dicari tahu tentang penanggungjawab usaha tersebut. Demikian jawaban kami. Terimakasih.	1 hari (24 Januari 2024	DISKOMINFO DPMPPTSP	sudah ditindaklanjuti

NO	TANGGAL	PENGADU	Email/Telp	TOPIK	INFORMASI ADUAN	TANGGAPAN/KETERANGAN	WAKTU PENYELESAIAN	OPD TERKAIT	STATUS PENYELESAIAN
					Mohon Dinas Terkait Bisa Mengecek Perijinan Dan SOP Usaha Ini, Apakah Masih Berlaku Dan Apakah Mereka Mempunyai Standar Keselamatan Bagi Pengguna Jasa Mereka , Termasuk Juga Apakah Mereka Mempunyai Asuransi Keselamatan Bagi Pengguna Jasa Mereka. Demi Keamanan Dan Kenyamanan Bersama				
3	30 Januari 2024	anonymous	drhardhi@gmail.com	klินิก hewan	Berikut Kami Sampaikan Beberapa Lokasi Kegiatan Praktik Dokter Hewan Atau Jasa Kesehatan Hewan Yang Belum Memiliki Izin Praktik Dokter Hewan Tetapi Masih Melakukan Kegiatan Praktiknya. Sebagaimana Disebutkan Dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 3 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner Disebutkan Bahwa Setiap Tenaga Medik Veteriner Dalam Menjalankan Kegiatannya Harus Memiliki Surat Izin Praktik Dokter Hewan Yang Masih Berlaku. Berikut Kami Informasikan Beberapa Lokasi Praktik Yang Masih Belum Memiliki Izinnya Dan Masih Beroperasi.	Salam hangat Sleman, Untuk memudahkan kami menindaklanjuti laporan Saudara, mohon informasi sebagai berikut: 1. Kornologi 2. alamat lengkap lokasi 3. fotobukti pendukung. Matur nuwun atas partisipasi penjengan untuk membantu mewujudkan Kabupaten Sleman yang lebih baik. (01/02/2024)	3 hari (1 Februari 2024	DISKOMINFO DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
4	30 Januari 2024	anonymous	drhardhi@gmail.com	praktid jasa dokter hewan ilegal	Berikut Kami Informasikan Beberapa Lokasi Praktik Dokter Hewan Jasa Kesehatan Hewan Yang Illegaltidak Memiliki Izin Yang Berlaku Dan Masih Beroperasi Tanpa Pengawasan. Maraknya Praktik Dokter Hewan Di Wilayah Sleman Saat Ini Semakin Membuat Kerasahan Banyak Pihak, Dimana Setiap Lokasi Praktik Kebanyakan Tidak Memilki Izin, Dibuktikan Dengan Tidak Adanya Papan Nama Dokter Hewan Yang Memiliki Nomor Surat Izin Praktik Di Lokasi Praktiknya. Beberapa Kalangan Masyarakat Sudah Melaporkan Atas Kejadian Ini, Akan Tetapi Penindakannya Masih Belum Ada. Mohon Bantuannya Untuk Melakukan Penindakan Terhadap Tempat-tempat Ilegal Berikut Terlampir. Terima Kasih	Salam hangat Sleman, Untuk memudahkan kami menindaklanjuti laporan Saudara, mohon informasi sebagai berikut: 1. Kornologi 2. alamat lengkap lokasi 3. fotobukti pendukung. Matur nuwun atas partisipasi penjengan untuk membantu mewujudkan Kabupaten Sleman yang lebih baik. (01/02/2024)	3 hari (1 Februari 2024	DISKOMINFO DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti

NO	TANGGAL	PENGADU	Email/Telp	TOPIK	INFORMASI ADUAN	TANGGAPAN/KETERANGAN	WAKTU PENYELESAIAN	OPD TERKAIT	STATUS PENYELESAIAN
5	30 Januari 2024	anonymous	hafiedzauliaphd@gmail.com	tempat hiburan	Tolong Pemerintah Kabupaten Sleman Terkhusus Dinas Perizinan Kabupaten Sleman Untuk Menindaklanjuti Mengenai Perizinan Berusaha Billiard, Ditemukan Bahwa Usaha Tersebut Belum Memiliki Izin Resmi Yang Diterbitkan Sesuai Dengan Peraturan Kabupaten Sleman Padahal Sudah Cukup Lama Beroperasi. Saya Berharap Agar Pengusaha-pengusaha Yang Berada Di Kabupaten Sleman Mengindahkan Peraturan Yang Sudah Ditetapkan Di Pemerintah Kabupaten Sleman Agar Selalu Tertib Dan Kondusif.	Salam hangat Slemanis, untuk pengecekan data perizinan kami membutuhkan data pemilik atau penanggungjawab kegiatan. Silahkan untuk dilengkapi dan dikirim kepada kami kembali. Matur nuwun atas partisipasi penjengan untuk membantu mewujudkan Kabupaten Sleman yang lebih baik. (02/02/2024)	4 hari (2 Februari 2024	DISKOMINFO DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
6	16 Februari 2024	anonymous	ID Laporan : https://business.facebook.com/latest/inbox Pukul : Kam 21.43 Pelapor : Restu Oktarina Akun : Restu Oktarina	Judul : Perizinan usaha batu alam	Lapor min ditengah desa paten, sleman, tepatnya belakang BPN sleman ada pabrik batu alam yg berada ditengah pemukiman warga, mohon dicek perizinan dan legalitas usahanya karena sangat mengganggu warga sekitar terimakasih Mohon memberikan tindak lanjutnya, matur nuwun atas kerjasamanya.	Baik, akan kami lacak	2 hari (18 Februari 2024	DISKOMINFO DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
7	17 April 2024	Anonymous	promosidabul@gmail.com/082341696838	Revisi PBG Dan SLF	Revisi Dokumen Yang Sama Berkali-kali Padahal Dokumen Sudah Sesuai	Untuk verifikasi berkas pendaftaran PBG/SLF berada di DPUPKP Sleman. Kalau melihat kekurangan syarat tersebut pemohon harus mengurus izin usaha OSS dahulu baru KRK/KKPR. untuk syarat PBG. (18/04/2024)	1 hari 18 April 2025	DISKOMINFO DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti

NO	TANGGAL	PENGADU	Email/Telp	TOPIK	INFORMASI ADUAN	TANGGAPAN/KETERANGAN	WAKTU PENYELESAIAN	OPD TERKAIT	STATUS PENYELESAIAN
8	23 April 2024	anonymous	Judul : Penolakan pembukaan toko miras ID Laporan : 8084 Pukul : 2024-04-23 23:20:52 Pelapor : Jazuli Akun : ahmadjazzuli@gmail.com Email : Telepon : 085743227068	Warung Minuman Beralkohol	SURAT PERNYATAAN SIKAP KEBERATAN PEMBUKAAN WARUNG PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL Kepada : Yth. Bupati Sleman Di – Sleman Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh. Sehubungan dengan informasi lisan yang kami peroleh dari berbagai sumber tentang rencana pembukaan warung/outlet penjualan minuman beralkohol di wilayah Dusun Berjo Kulon, Sidoluhur, Godean, Sleman. Kami Pengurus Gabungan Takmir Masjid Se-Berjo Raya, Kalurahan Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman pada dasarnya mendukung program pengembangan peningkatan perekonomian masyarakat secara umum, khususnya di wilayah Sidoluhur Godean. Namun perlu diketahui juga bahwa tidak semua kegiatan usaha seperti warung / outlet penjualan minuman beralkohol dapat diterima oleh masyarakat sekitar, dan bebas membuka atau menyelenggarakan kegiatan usahanya tanpa ada izin resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang, untuk itu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawassan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan, pada Pasal 10 ayat(1), dan ayat (2), serta Pasal 12, bahwa peredaran dan penjualan minuman beralkohol di daerah dilarang di tempat-tempat seperti : a. rumah tinggal, b. berdekatan dengan tempat peribadatan (masjid), c. jarak dari tempat peribadatan (masjid) paling dekat adalah 500 meter. 2. Lokasi rencana warung penjualan di Berjo Kulon berdekatan dengan masjid-masjid sekitarnya, yaitu : a. Jarak dari masjid Fatkhurrahman Berjo Wetan 60 meter. b. Jarak dari masjid Darussalam Berjo Kulon 300 meter. c. Jarak dari masjid Secoharjono Berjo Kulon 400 meter.	Untuk mengetahui informasi perizinan terkait usaha tersebut, kami memerlukan data nama penanggungjawab, perusahaan, atau nomor telepon terkait. Demikian jawaban kami. Terimakasih.	1 hari (24 April 2024)	DISKOMINFO DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti

NO	TANGGAL	PENGADU	Email/Telp	TOPIK	INFORMASI ADUAN	TANGGAPAN/KETERANGAN	WAKTU PENYELESAI AN	OPD TERKAIT	STATUS PENYELES AIAN
					3. Adanya keresahan warga masyarakat sekitar, dan kekawatiran dampak negatif terhadap generasi muda di wilayah kami dengan adanya kemudahan akses mendapatkan minuman beralkohol. Oleh karena itu kami mewakili umat / jamaah dari Masjid se Berjo Raya, Kalurahan Sidoluhur, Kecamatan Godean menyatakan KEBERATAN / MENOLAK dengan rencana pembukaan warung penjualan minuman beralkohol di lingkungan Berjo, Sidoluhur, Godean. Kami mohon dengan hormat kepada Bupati dan pihak berwenang untuk memperhatikan dan menjadikan surat pernyataan keberatan dari kami ini menjadi bagian dari dasar dalam penolakan penerbitan izin SKPL. Demikian surat pernyataan ini kami buat atas kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidoluhur, 17 April 2024 Gabungan Takmir Masjid Se-Berjo Raya Sidoluhur Mohon memberikan tindak lanjutnya, matur nuwun atas kerjasamanya.				

NO	TANGGAL	PENGADU	Email/Telp	TOPIK	INFORMASI ADUAN	TANGGAPAN/KETERANGAN	WAKTU PENYELESAIAN	OPD TERKAIT	STATUS PENYELESAIAN
9	3 September 2024	anonymous	ID Laporan : 8549 Pukul : 2024-09-01 22:26:35 Pelapor : Pak Andi Akun : Email : Antoniusetiawan@gmail.com Telepon : 081328217239 Alamat : Jl. Dusun Ngangkrik Jl. Jambon No.1, Salakan, Trihanggo, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman	Gangguan Suara Keras LIVE MUSIC Angkringan Mbok Naryo/Jam Belajar Anak Sekolah	Deskripsi : ANGKRINGAN MBOK NARYO Di Jalan Kabupaten No. 3 Trihanggo Gamping Sleman Yang Setiap Malam Setiap Hari Mengadakan LIVE MUSIC dari Jam 20.00 – 22.30. Kami Sebagai Warga Yang Tinggal Berdekatan Dengan Tempat Tersebut Sangat Terganggu. Mengingat Di Jam 19.30 Hingga Pukul 21.00 Adalah Jam Belajar Anak Sekolah, Saya Memiliki Anak Yg Msh SD. Di Jam Tersebut Anak-anak Semestinya Dapat Dengan Tenang Belajar. Namun Yang Terjadi Anak-anak Sangat Terganggu Dengan Keras Nya Suara Dari LIVE MUSIC . Suara Dari LIVE MUSIC ini Semakin Keras Di Jam 21.30 Sampe Jam 22.30 Sehingga putra Putri Kami Harus Menunggu Suara Berhenti Agar Anak Bisa Tidur Setelah Jam 22.30. Karena Durasi Jam Tidur Yang Setiap Hari Pendek Dan Tidur Yang Tidak Berkualitas, Anak-anak Sering Mengeluhkan Kantuk Dan Capek Saat Menempuh Pelajaran Di Sekolah. Mohon Perhatian Dari Dinas Terkait Pada Gangguan Polusi Suara Ini. Mohon memberikan tindak lanjutnya, matur nuwun atas kerjasamanya. NB: Laporan diteruskan ke Satpol PP, DLH dan Perizinan.	Baik. Aduan akan dikoordinasikan dengan OPD terkait. Terimakasih.	1 hari (3 September 2025	DISKOMINFO DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
B WEBSITE DPMPTSP									
1	2 Januari 2024	Dani <perdanilovy17@gmail.com>			Selamat pagi admin, Mohon informasi, saya hendak membeli tanah kavling di daerah sleman utara, dari pihak marketing tanah tersebut, saya menangkap bahwa proses SHM tanah tersebut awalnya adalah leter C, kemudian dikonversi menjadi SHM sawah induk, dan kemudian dipecah pecah menjadi SHM sawah atas nama pembeli, apakah prosedurnya memang bisa seperti itu? Atau pihak properti wajib membantu dan mengurus SHM sawah induk dipecah menjadi SHM pekarangan? Karena mengingat di kavling tersebut akan didirikan bangunan? Terimakasih banyak sebelumnya	Kami mohon agar dipastikan apakah sertipikat sudah atas nama pembeli. Jika sertipikat tersebut sudah atas nama pembeli dan ada akses jalan, maka dapat diurus pengeringan. Sebagai tambahan informasi: Untuk pembangunan perumahan, pastikan pihak properti adalah pihak yang memegang izin untuk melakukan kegiatan pengembangan perumahan, bisa PT atau perorangan. Untuk Pengembang perorangan hanya boleh sampai 5 unit saja., lebih dari 5 unit harus dilakukan dalam bentuk badan hukum PT	1 hari (3 Januari 2024	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti

NO	TANGGAL	PENGADU	Email/Telp	TOPIK	INFORMASI ADUAN	TANGGAPAN/KETERANGAN	WAKTU PENYELESAIAN	OPD TERKAIT	STATUS PENYELESAIAN
						Tahapan pengembangan perumahan: 1. Pengembang memiliki KKPR (kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) bahwa secara tata ruang lokasi tersebut boleh digunakan untuk kegiatan pengembangan perumahan; 2. Perolehan tanah di BPN, tanah menjadi HGB PT dan perubahan status tanah sawah menjadi pekarangan; 3. PBG kolektif melalui simbg.pu.go.id. sebagai syarat untuk pemecahan bidang tanah; 4. Pemecahan bidang tanah di BPN menjadi sertifikat per kavling; 5. PBG per unit melalui simbg.pu.go.id Baik			
2	9 Januari 2024	Erika Sjamsujayadi			mohon ijin untuk bertanya pak/bu,,, apakah tanah seluas 281m2 masih bisa dipecah dan dibuatkan SHM?	Syarat pecah kapling adalah minimal hasil pecahan seluas 60 meter persegi. (10 Januari 2024)	1 hari (10 Januari 2024)	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
3	9 Januari 2024	Erika Sjamsujayadi			mohon maaf luas tanah 181m2 apakah masih bisa dibagi 2 dan memiliki SHM?	Syarat pecah kapling adalah minimal hasil pecahan seluas 60 meter persegi. (10 Januari 2024) Untuk pemecahan bidang tanah harus memperhatikan batasan kavling minimal, kavling minimal masing masing kawasan berbeda, tergantung KDB di lokasi tersebut. Untuk kawasan non resapan air antara 90-108 m2, untuk kawasan resapan air minimal 126m2. Untuk pemecahan tanah tahapannya: pengurusan KRK, perolehan tanah di BPN (Pencoretan/pengeringan), PBG Kolektif, pecah bidang tanah di BPN. (15 Januari 2024)	1 hari (10 Januari 2024)	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
4	9 Januari 2024	Nia			Selamat siang admin, saya ingin membeli rumah bekas yang berdiri di atas tanah pekarangan dengan status SHM tanpa IMB/PBG. Apa saja langkah yang harus saya lakukan untuk mendaftarkan IMB/PBG nya, lokasi rumah yang ingin di beli di kecamatan Kalasan. Dari makelar meminta biaya sekitar 30juta untuk luas tanah 187m untuk pembuatan PBG (pembuatan gambar, pengukuran, pendaftaran online) apakah biayanya sebesar itu? Mungkin ada yang punya pengalaman juga.	Jika bangunan tersebut sudah terbangun sampai dengan tahun 2015 bisa diuruskan dispensasi PBG, dan gratis (10 Januari 2024) Tahapan pengurus PBG di wilayah Kalasan adalah dengan mengurus KKKPR Non Berusaha, kemudian mengurus PBG Rumah Tinggal. Jika bangunan tersebut sudah terbangun sampai dengan tahun 2015 bisa diuruskan dispensasi PBG, dan gratis. (10 Januari 2023)	1 hari (10 Januari 2024)	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti

NO	TANGGAL	PENGADU	Email/Telp	TOPIK	INFORMASI ADUAN	TANGGAPAN/KETERANGAN	WAKTU PENYELESAIAN	OPD TERKAIT	STATUS PENYELESAIAN
5	23 Januari 2024	Wienda		pengeringan	selamat siang, mau tanya pak: 1. saya ktp kec. maguwoharjo sleman, mau beli tanah sawah di kecamatan berbah apakah bisa? 2. tanah tsb SHM sawah apakah bisa dikeringkan & di proses menjadi SHM P untuk dibangun rumah tinggal? mohon jawabannya. Terimakasih	Jawaban: 1. Di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1954 tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah NO. 224 TAHUN 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian disebutkan: "Dilarang untuk melakukan semua bentuk pemindahan hak baru atas tanah pertanian yang mengakibatkan pemilik tanah yang bersangkutan memiliki bidang tanah di luar Kecamatan di mana ia bertempat tinggal." 2. Untuk tanah sawah bisa dikeringkan apabila sawah tersebut berada di zona permukiman tetapi apabila di zona tanaman pangan atau lahan pertanian berkelanjutan atau di lahan sawah dilindungi maka tidak dapat dikeringkan. Untuk melihat sawah tsb berada di zona apa dapat dilihat di aplikasi simtaru (25 Januari 2024)	2 hari (25 Januari 2024)	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
6	31 Januari 2024	Pramudya			Untuk proses pengeringan untuk dijadikan tempat usaha bagaimana ya ? mohon dijelaskan ?	Saudara dapat melakukan langkah langkah : 1. Mengurus NIB 2. Pengajuan KRK melalui aplikasi SINOM (5 Februari 2024)	4 hari (5 Februari 2024)	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
7	20 Februari 2024	Roy		tata ruang	Apakah shm sawah di zona kuning dapat dibangun lapangan mini soccer terbuka (outdoor) untuk kegiatan usaha tanpa perlu pengeringan? Kalau harus pengeringan menggunakan skema pengajuan kkpr atau bagaimana?	Harus mengurus KRK terlebih dahulu dan menunggu rekomendasi Tata Ruang dari DPTR apakah harus alih fungsi lahan atau tidak. (26 Februari 2024)	5 hari (26 Februari 2024)	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
8	29 Februari 2024	Aji Yudha		balik nama	Selamat pagi Pak/Bu. Saya baru saja membeli sebidang tanah SHM Sawah di Kecamatan Tempel pada Februari 2022. Saya berencana mengurus balik nama sertifikat secara mandiri. Apa saja syarat dan bagaimana prosedur pengurusan secara mandiri untuk balik nama yang masih dalam satu kecamatan? Terimakasih atas jawabannya	Silahkan menghubungi Kantor Pertanahan (BPN) (1 Maret 2024)	2 hari (1 maret 2025)	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti

NO	TANGGAL	PENGADU	Email/Telp	TOPIK	INFORMASI ADUAN	TANGGAPAN/KETERANGAN	WAKTU PENYELESAIAN	OPD TERKAIT	STATUS PENYELESAIAN
9	29 Februari 2024	Aji Yudha		balik nama	Selamat pagi Pak/Bu. Saya memiliki tanah hibah (orang tua masih) SHM pekarangan di Kabupaten Bantul dan saya merupakan warga Kabupaten Sleman. Bagaimana prosedur pengurusan proses balik nama untuk tanah hibah dan persyaratan yang harus saya siapkan? Terimakasih	Silahkan menghubungi Kantor Pertanahan (BPN) (1 Maret 2024)	2 hari (1 maret 2025)	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
10	29 Februari 2024	Diah		pengeringan	di aplikasi simtaru tertulis "kawasan tanaman pangan" dan "kawasan budidaya" dengan warna kuning stabilo, apakah bisa di urus menjadi SHM pekarangan?	Jika untuk usaha, silahkan mengurus KRK. Jika untuk rumah tinggal dan berada di luar RDTR, silahkan mengurus PKKPR non berusaha. Jika tanah di dalam RDTR, silahkan mengurus KKKPR non berusaha. (1 Maret 2024)	2 hari (1 maret 2025)	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
11	4 Maret 2024	Panca		pecah kavling	selamat siang..kami sekeluarga mau beli tanah sawah seluas 1300 meter2,tanah tersebut masuk kawasan permukiman perkotaan dalam simpentaru,bagaimana prose yg harus kami lakukan untuk bisa memecah bidang tanah tersebut menjadi beberapa bagian kepemilikan?	Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Proses NIB di OSS debgab KBLI Rumah Deret 2. Proses KRK di https://perizinan.slemankab.go.id/ 3. Proses di BPN 4. Proses PBG Kolektif di https://simbg.pu.go.id/ 5. Proses Pisah Kapling di BPN 6. Proses PBG Per Unit di https://simbg.pu.go.i	2 hari (5 Maret 2024)	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
12	20 Maret 2024	Roy		KKPR	Apakah shm sawah di zona kuning dapat dibangun lapangan mini soccer terbuka (outdoor) untuk kegiatan usaha tanpa perlu pengeringan? Kalau harus pengeringan memggunakan skema pengajuan kkpr atau bagaimana?	Harus mengurus KRK terlebih dahulu dan menunggu rekomendasi Tata Ruang dari DPTR apakah harus alih fungsi lahan atau tidak. (26 Februari 2024)	5 hari (26 Februari 2024)	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
13	5 Juni 2024	Wahyu Wibowohadi		Pertanahan	Maaf mau tanya untuk pemecahan kedua karena pembeli ingin menambah luas tanah yang dibeli apakah bisa, atau perlukah site plain dari PEMDA dan kira kira berapa luas minimalnya karena akan digaungkan ke pembeli yang sama	untuk pecah kedua pemohon bisa langsung ke BPN	2 hari 5 Juni 2025	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
14	24 Juni 2024	Wahyu Wibowohadi		Pertanahan	Selamat malam, saya warga luar sleman (KTP DKI jakarta), apakah saya bisa membeli dan memiliki tanah SHM sawah di Sleman?	Boleh	1 hari 24 Juni 2024	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti

NO	TANGGAL	PENGADU	Email/Telp	TOPIK	INFORMASI ADUAN	TANGGAPAN/KETERANGAN	WAKTU PENYELESAIAN	OPD TERKAIT	STATUS PENYELESAIAN
15	27 Juni 2024	Orans Fabeoki		Pertanahan	Saya punya tanah di Sleman status tanah lahan sawah apabila mau saya dirikan rumah apakah ada aturannya aturan pengeringan dan Berapa biaya pengeringan di BPN	1. Harus dilakukan pengurusan PKKPR non usaha untuk wilayah Sleman tengah dan utara, atau KKKPR non usaha untuk wilayah Sleman timur dan barat; 2. Pengurusan Pengeringan di BPB; 3. Pengurusan PBG	2 hari 28 Juni 2024	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
16	25 Juli 2024	Orans Fabeoki		PBG	BPB itu singkatan apa ya? Pengurusan PBG itu apa ya?	PBG adalah singkatan dari Persetujuan Bangunan Gedung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.	2 hari 26 Juli 2024	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
17	12 Agustus 2024	Fahri		pembelian tanah	Saya warga kota Jogja, apakah sayabisa membeli tanah di Sleman? Karena saya dengar bahwa hanya warga KTP Sleman yang bisa membeli tanah di Sleman	Apabila tanah tersebut adalah tanah pekarangan, orang dengan KTP dari luar Sleman juga bisa membelinya.	2 hari 13 Agustus 2024	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
18	13 Agustus 2024	Ferli		pengeringan	saya warga jakarta pemilik sawah di sleman karena warisan, apakah saya boleh melakukan pengeringan agar memudahkan untuk menjual sawah dimaksud ?	Permohonan pengeringan dapat diajukan, tetapi untuk dapat dikabulkan atau tidak nya permohonan tersebut disesuaikan dengan arahan tata ruang. Terimakasih.	1 hari 13 Agustus 2024	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
19	9 September 2024	Mutee		Alih Fungsi Lahan	izin bertanya bila memiliki sawah namun diweb bpn zona kuning dan setelah dicek dikantor menggunakan titik koordinat zona hijau, jika seperti itu apakah bisa diganti menjadi shm pekarangan atau untuk dibangun rumah ? langkah yang harus diambil untuk didirikan rumah apa ya ?	Untuk kepastiannya, silahkan mengajukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, karena rekomendasi diterbitkan oleh DPTR	2 hari 10 September 2024	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
20	1 Oktober 2024	Anggi		kavling minimal	Selamat pagi admin. Saya ingin mengurus pecah tanah shm pekarangan di Kalasan yang luas nya kurang dari kavling minimum 90 m². Saya sudah datang ke BPN Sleman dan tidak bisa diurus di sana karena tidak memenuhi kavling minimum. Sudah terdapat bangunan sejak tahun 2015. Bagaimana prosedur pengurusannya dan di dinas mana ya admin? Maturnuwun	untuk pecah sertipikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (1 oktober 2024)	1 hari 1 Oktober 2024	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti

NO	TANGGAL	PENGADU	Email/Telp	TOPIK	INFORMASI ADUAN	TANGGAPAN/KETERANGAN	WAKTU PENYELESAIAN	OPD TERKAIT	STATUS PENYELESAIAN
21	2 Oktober 2024	Anggi		kavling minimal	Mohon informasi undang ² nomor berapa tahun berapa nggeh admin. Saya search di google tidak ada soalnya. Maturnuwun	Terima kasih atas informasinya, dapat kami sampaikan terkait pecah kavling diatur di dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 50.3 Tahun 2020 tentang Pengembangan Perumahan, tahapan perizinan berupa: 1. NIB dengan KBLI 68111, real estate yang disewakan atau dimiliki sendiri (diproses melalui OSS) 2. Keterangan Rencana Kabupaten (diproses melalui aplikasi SINOM perizinan.slemankab.go.id) 3. PBG Kolektif (diproses melalui aplikasi simbg.pu.go.id) 4. Pecah kapling(di proses di BPN) 5. PBG per unit. (diproses melalui aplikasi simbg.pu.go.id) Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, terima kasih (4 Oktober 2024)	3 hari 4 Oktober 2024	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
22	3 Oktober 2024	Deha		pengeringan	selamat malam, saya bermaksud mengubah status sawah menjadi pekarangan. tanah ini atas nama saya sendiri lokasi di Sleman, tapi ktp saya kota. apakah bisa saya urus, kalau bisa kemana saya harus mengurusnya, dan apa saja yang harus saya persiapkan? terimakasih	KTP tersebut tetap bisa digunakan untuk pengurusan. Kalau peruntukan untuk usaha maka harus berproses di oss.go.id, kalau untuk rumah tinggal, maka pengurusan yang dilakukan atalah KKPR non usaha melalui perizinan.slemankab.go.id	2 hari 4 Oktober 2024	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
23	20 Oktober 2024	Pipit		pengeringan	Untuk pengeringan sawah yg sufah zona kuning dan dapat ijin dari pupr untuk luas 7000m2 diajukan secara perorangan?	Perorangan juga bisa jika untuk usaha, jika untuk rumah tinggal maksimal 600 meter persegi. (21 Oktober 2024)	2 hari 21Oktober 2024	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
24	28 Oktober 2-024	Susilo Herdiyanto		kavling minimal	saya punya tanah luas 880 SHM pribadi mau saya pecah apakah ada minimal luasnya ? lokasi disendangrejo minggir sleman , mohon arahan terima kasih	Luas kavling minimal adalah 90 meter persegi. (30 Oktober 2024)	3 hari 30 Oktober 2024	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
25	30 Oktober 2024	Rahman		pengeringan	Maaf mau tanya, untuk pengeringan sawah (SHM Persawahan (sudah jalur kuning)) dan akan diubah menjadi SHM Pekarangan, kira-kira biayanya berapa ya?terima kasih	Untuk perizinan KKPR tidak dipungut biaya, sedangkan untuk sertipikat adalah kewenangan BPN.	1 hari 30 Oktober 2024	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
26	1 November 2024	Ronald Prasetya		tata ruang	Permisi min mau tanya, tanah saya luas 2192m ² status tanah saya di sertifikat sudah pekarangan setelah di cek masih masuk zona kawasan pangan kebetulan lokasi tanah mepet dengan desa/kawasan pemukiman, apakah bisa dibangun rumah? mengingat sertifikat dengan status pekarangan diterbitkan sejak 2016. Terimakasih.	Jika tanah tersebut di Sleman Timur, Tengah, atau Barat, silakan mengajukan KKKPR non berusaha, sedangkan jika tanah tersebut terletak di Sleman Utara, silakan mengajukan PKKPR non berusaha untuk mendapatkan arahan tata ruang. (11 November 2024)	7 hari 11 November 2024	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti

NO	TANGGAL	PENGADU	Email/Telp	TOPIK	INFORMASI ADUAN	TANGGAPAN/KETERANGAN	WAKTU PENYELESAIAN	OPD TERKAIT	STATUS PENYELESAIAN
27	14 November 2-24	Pradita		sertifikat	Ijin bertanya, sy baru pecah sertivikat tanah, sudah mengajukan pengurusan surat pajak tapi kenapa tidak turun2 ya min, katanya disuruh taat bayar pajak tapi bikin surat pajak kok susah	Silakan melakukan pengurusan di Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, telepon 0274 867248. (14 November 2024)	1 hari 14 Noavember 2024	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
28	26 November 2024	YN		pecah kavling	Salam, Saya dkk berencana memecah kavling di wilayah Tridadi Sleman. Berapa luasan minimal pemecahan kavlingnya ya Pak/Bu?	Luas kavling minimal adalah 90 meter persegi. (28 November 2024)	3 hari 28 November 2024	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
29	3 Desember 2024	Heru Priyono		pengeringan	Sy akan melakukan proses pengeringan lahan sawah seluas 821 di jln kaliurang km 12 masuk ke timur 500 m. Langkah apa yg harus saya lakukan terlebih dahulu	Untuk KKPR non usaha silahkan mendaftar melalui https://perizinan.slemankab.go.id (10 Desember 2024)	6 hari 10 desember 2024	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
30	9 Desember 2024	Basuki		pengeringan	Selamat siang, Saya ingin bertanya, jika tanah sawah didaerah Sleman akan diajukan pengeringan menjadi pekarangan, kemudian tanah pekarangan tersebut nantinya akan disewakan bagaimana pengajuan / perizinannya ? Terima kasih	Kalau untuk usaha maka silakan mendaftar melalui oss.go.id . Jika untuk rumah tinggal silakan mendaftar melalui https://perizinan.slemankab.go.id . Terkait sewa-menyewa menjadi urusan pribadi. (10 Desember 2024)	2 hari 10 desember 2024	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
31	10 Desember 2024	Wanti		izin usaha	Selamat siang Saya berencana membuka usaha rumah makan di rumah tinggal yang saat ini saya sewa / kontrak di condong catur. Apa yg perlu dilakukan utk mengurus hal tersebut ?	Uuntuk kegiatan berusaha, silakan mengurus NIB melalui oss.go.id . Jika mengalami kesulitan, silakan datang ke loket DPMPTSP di Mall Pelayanan Publik Sleman untuk mendapatkan pendampingan. Untuk peruntukan bangunan dari fungsi rumah tinggal ke peruntukan fungsi usaha silakan mengurus PBG peruntukan fungsi usaha silakan mengurus melalui https://simbg.pu.go.id . (12 Desember 2024)	3 hari 12 Desember 2024	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
32	26 Desember 2024	Apri		pengeringan	Selamat siang. Izin bertanya, saya memiliki sertifikat tanah sawah yang berada di zona ungu seluas 216 m2. Apakah dapat dilakukan pengeringan terhadap sebagian tanah tersebut (yang dikeringkan hanya separuhnya)? Sehingga sertifikat dapat dipecah menjadi 2 sertifikat baru, yaitu sertifikat tanah pekarangan seluas 108 m2 dan sertifikat tanah sawah seluas 108 m2..Mohon pencerahannya.. Terima kasih	Silakan mengajukan Ketiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Non Usaha untuk rumah tinggal, atau Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Usaha untuk selain rumah tinggal.	2 hari 27 Desember 2024	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti

NO	TANGGAL	PENGADU	Email/Telp	TOPIK	INFORMASI ADUAN	TANGGAPAN/KETERANGAN	WAKTU PENYELESAIAN	OPD TERKAIT	STATUS PENYELESAIAN
C	EMAIL DPMPTSP								
1	2 Januari 2024	"antok toto" <antoktoto@yahoo.co.id>		PBG dispensasi	selamat siang mohon info saya mau mengajukan ijin pbg rumah luas bangunan kira2 60 m2 di wilayah pundong 1 tirtoadi mlati sleman untuk tata caranya gimana gih, bangunan sudah terbangun +/- 2 bulan yg lalu apakah bisa ikut program dispensasi atau bagaimana gih alurnya mohon infonya terima kasih	Berikut ini kami sampaikan formulir dan daftar persyaratan dispensasi PBG Terlampir. (3 Januari 2024) Terimakasih. untuk dispensasi PBG untuk bangunan yang terbangun sampai dengan tahun 2015. (4 Januari 2024)	3 hari 4 Januari 2024	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
								DPMPTSP	
2	2 Januari 2024	"nataliia kuspis" <nataliia.kuspis@majola.pro>;		Izin Pemondokan	Assalamu'alaikum wr wb, perkenalkan saya raden kerja di pemda DIY, mau konsul syarat lengkap yg harus dimiliki jika mau mendirikan kost di kledokan seturan sleman?	Terkait dengan pendirian kost, ada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 9 Tahun 2007 Tentang Pemondokan dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemondokan. Prosedur pengurusan perizinan berusaha adalah sebagai berikut: 1. Mengurus NIB untuk KBLI rumah kost di oss.go.id 2. Jika nilai investasi lebih kecil daripada 5 Milyar, maka mengurus KRK di Sleman 3. Megnurus PBG di simbg.pu.go.id Demikian jawaban kami	3 hari 4 Januari 2024	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
3	7 Februari 2024	"Imam Subagio" <imamsubagio224@gmail.com>		SIP	Mohon informasi, kapan SIP dapat diambil. No. Permohonan :783-2024.KES Dokter Imam Subagio, Mkes	mohon maaf masih dalam proses pengolahan dokumen, apabila sudah jadi akan diinfokan melalui email yang digunakan untuk mendaftar. terima kasih (15 Februari 2024)	6 hari 15 Februari 2024	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
4	18 Maret 2024	"Hidayatullah Hidayat" <danasani2011@gmail.com>		EFFIn	Pengajuan efin NAMA : HIDAYATULLAH WA : 085868588255 TTL : 25 Juni 1977 NPWP : 71.349.807.9-542.000 NIK: 3404052506770003 email : danasani2011@gmail.com	Silahkan data langsung ke Loker KPP Pratama di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman pada hari dan jam kerja, yaitu Senin-Jumat pukul 08.00 - 12.00 WIB. Terimakasih. (19 Maret 2024)	2 hari 19 Maret 2024	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
5	27 Maret 2024	"Icha Oneng" <ichaoneng@ymail.com>		pencabutan SIP	Untuk pencabutannya bagaimana ngeh pak...saya masuk di sip nakes tp gagal login krn lupa password	Silakan masuk ke akun di perizinan.slemankab.go.id dan pilih menu pencabutan. (28 Maret 2024)	2 hari 28 Maret 2024	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti

NO	TANGGAL	PENGADU	Email/Telp	TOPIK	INFORMASI ADUAN	TANGGAPAN/KETERANGAN	WAKTU PENYELESAIAN	OPD TERKAIT	STATUS PENYELESAIAN
6	21 April 2024	"Antiek Iptiyana" <antiekipty@gmail.com>			Selamat sore, mohon ijin saya antiek Iptiyana, beberapa data saya kirimkan guna untuk syarat pencabutan SIPP. Mohon bantuannya. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya.	Selamat pagi. Meralat jawaban kami sebelumnya. karena SIPP tersebut dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang, maka untuk mencabut SIPP tersebut diajukan permohonan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang. Terimakasih. (22 April 2024)	2 hari 22 April 2024	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
7	22 April 2024	"Antiek Iptiyana" <antiekipty@gmail.com>			Selamat siang bapak/ibu menanggapi terkait sipp saya, saya sudah mencabut sipp saya di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu kota magelang dan sudah disetujui untuk pencabutan tersebut. Lalu sekarang saya mengajukan permohonan sipp saya di sleman, mohon arahnya bapak	Silahkan mengajukan permohonan melalui https://perizinan.slemankab.go.id Terimakasih (22 April 2024)	1 hari 22 April 2024	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
8	3 Mei 2024	Zahra Nur Fadilah zahra.n.f@mail.ugm.ac.id	Data PMA		Kepada Yth, Bapak/Ibu pimpinan. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya, perkenalkan saya Zahra Nur Fadilah mahasiswa semester akhir Prodi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada. Izin bertanya terkait dengan mekanisme permohonan data untuk keperluan tugas akhir. Apakah boleh melalui online dengan saya mengirimkan surat dalam bentuk soft file atau harus datang bersurat ke Dinas nggih? Jika memungkinkan saya berencana untuk mengajukan data terkait dengan realisasi nilai investasi PMA yang akan saya gunakan nantinya untuk keperluan Tugas Akhir. Sebagai catatan saya sudah mencari data mulai tahun 2015 hingga 2022 pada website dan dokumen perencanaan Kabupaten Sleman, namun data pada data pada tahun 2023 belum saya temukan. Atas perhatian bapak/ibu, saya ucapkan terima kasih.	Data tersebut dapat dilihat di https://nswi.bkpm.go.id/ Terimakasih.	1 hari 3 Mei 2024	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
9	13 Mei 2024	Zahra Nur Fadilah zahra.n.f@mail.ugm.ac.id	Data PMA		Sebelumnya terima kasih atas balasannya, Ini saya sudah coba akses di https://nswi.bkpm.go.id/ namun hanya sampai pada tingkat provinsi saja bapak/ibu, untuk itu apakah saya perlu untuk mengirimkan surat perizinan mencari data atau bagaimana nggih, Atas perhatian bapak/ibu, saya ucapkan terima kasih.	Untuk melihat data per Kabupaten, buka situs https://nswi.bkpm.go.id kemudian pilih menu Perkembangan Investasi, pada koolom Berdasarkan pilih Kabupaten / Kota. Pada kolom periode, pilih Per tahun atau Per Triwulan. Selanjutnya, Pilih range tahun awal dan tahun akhir. Klik pada Kabupaten / Kota, pilih Kabupaten Sleman lanjut klik Tampilkan. Data akan ditampilkan.	2 hari 14 Mei 2024	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti

NO	TANGGAL	PENGADU	Email/Telp	TOPIK	INFORMASI ADUAN	TANGGAPAN/KETERANGAN	WAKTU PENYELESAIAN	OPD TERKAIT	STATUS PENYELESAIAN
10	17 Mei 2024	"Firdausi Safitri" <firdausisafitri@gmail.com>		sertifikat	Selamat pagi.. Maaf mau tanya.. Semisal ketika pemecahan sertifikat kami di minta utk menanda tangani bahwa BPN tidak bertanggungjawab atas di setuju / tidaknya PBG/IMB nantinya, apakah ada pengaruh dalam pembuatan IMB nanti ya? Mohon penjelasannya.. Terimakasih	selamat pagi. Dapat kami sampaikan bahwa PBG dapat terbit apabila terpenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya. Apabila menurut kajian teknis, tanah yang diajukan PBG tersebut ternyata menurut kajian teknis tidak layak untuk didirikan bangunan karena dari keluasan hasil pecah kavling itu habis terkena roi/ sempadan jalan atau sempadan bangunan, maka PBG tidak dapat diterbitkan. untuk lebih jelasnya mohon bisa ke DPUPKP. terimakasih.	2 hari 18 Mei 2024	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
11	3 Juli 2024	Login 443 dpmptsp@slemankab.go.id;		PKKPR	Assalamualaikum wr wb Maaf mengganggu ka .. Mw tnya ka, klo pembuatan imb dan pbb tanah hijau lokasi Desa girikerto kec turi kab sleman persyaratannya apa aja nggih ka .. guna pengurusan tanah hijau mau dirubah hak tanah ke bangunan.. Persyaratannya apa aja nggih ka .. mtur nuwun ..	Harus dilakukan pengurusan PKKPR non berusaha melalui perizinan.slemankab.go.id . Kalau mbelum memiliki PTP (Pertimbangan Teknis Pertanahan) maka dilakukan pengurusan PKKPR non berusaha paralel PTP.	3 Hari 5 Juli 2024	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
12	27 September 2024	"V.L. Sinta Herindrasti" <sintaherindrasti22@gmail.com>;		Izin Homestay	Dengan hormat, Mohon informasi proses ijin usaha homestay lokasi di Jl STM Pembangunan-Sleman 1/ Form apa yang digunakan? 2/ Apakah bisa menggunakan KTP domisili sekarang (Jakarta)? 3/ Bagaimana prosesnya ? apakah melalui online? Terimakasih	1. pengurusan NIB di oss.go.id 2. KRK di https://perizinan.slemankab.go.id 3. Jika modal lebih besar dari 5 milyar rupiah maka diajukan pengurusan KKPR OSS di https://oss.go.id 4. KTP mana saja bisa digunakan.	2 hari 30 September 2024	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
13	2 Oktober 2024	"Adi Lukmantoro" <adilukmantoro@gmail.com>		PBG	Selamat Pagi Bapak/Ibu Mohon kami dapat diberikan Informasi mengenai Perhitungan Teknis Sanksi Admin-istrasi Pelanggaran No-mor 640/6398/2024 atas nama PT. INDOSAT TBK, dimana nilai den-da tersebut akan kami submit kemanage-ment untuk pengurusan pembayaran nilai denda tersebut.	baik. untuk rumus perhitungan sanksi administrasi pelanggaran bangunan pada mekanisme PBG dapat di tanyakan ke DPUPKP. atau bisa menghubungi WA layanan simbg DPUPKP di nomor 081329814794. terima kasih	2 hari 3 Oktober 2024	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
D.	MEDIA SOSIAL DPMPTSP								
					NIHIL				
E.	MEDIA SOSIAL PEMKAB SLEMAN								
					NIHIL				

NO	TANGGAL	PENGADU	Email/Telp	TOPIK	INFORMASI ADUAN	TANGGAPAN/KETERANGAN	WAKTU PENYELESAIAN	OPD TERKAIT	STATUS PENYELESAIAN
F. EMAIL PEMKAB SLEMAN									
1	20 Februari 2024	Mastrie		Perumahan	Kepala Dinas Perijinan Sleman /Satpol PP Sleman/Minggir Di Pakeran, RT 02/13 Sendangmulyo, Minggir Sleman (sebelah Utara SMAN 1 Minggir) Ada Developer Perumahan Ilegal Menjual Tanah Kavling Perumahan Masih Berupa Sawah Aktif, Tanpa Sosialisasi Dan Ijin Tetangga Sekitarnya. Tabrak Sana Sini,. Dampaknya Ke Tetangga Sekitar Tidak Dipedulikan., Seperti Banjir , Saluran Mampet, Dsb. Mohon Ditindak Oleh Dinas Terkait.	Salam hangat Sleman, Untuk memudahkan kami menindaklanjuti laporan Saudara, mohon informasi sebagai berikut: 1. Kornologi 2. alamat lengkap lokasi 3. fotobukti pendukung. Matur nuwun atas partisipasi penjengan untuk membantu mewujudkan Kabupaten Sleman yang lebih baik. (20/02/2024)	1 hari 20 Februari 2024	DPMPTSP, DISKOMINFO	sudah ditindaklanjuti
2	19 Juni 2024	intan muninggar/ intanmuninggar@gmail.com/085642190005		SISTEM PERIZINAN	Kak, website SINOM apakah down? Untuk perijinan apakah ada alternatif atau menunggu website tersebut aktif lagi?	Sedang ada maintenance di Diskominfo Sleman. Untuk pendaftaran menunggu sinom aktif lagi. Terima kasih. (19/06/2024)	1 hari 19 Juni 2024	DPMPTSP, DISKOMINFO	sudah ditindaklanjuti
G.	SP4N								
					NIHIL				
H. DATANG LANGSUNG DPMPTSP									
1	9 Januari 2024	Ibnu (kuasa Wachid Fauzi)	Pajangan Sndangtirta Berbah	KRK	menyampaikan keberatan atas permohonan KKPR/KRK yang dikabulkan sebagian	disarankan agar mengajukan surat keberatan untuk memudahkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.	1 hari 9 Januari 2024	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
2	15 Janauri 2024	Ibu Juwanti	Jl. Solo KM 8 Maguwoharjo Depok	reklame	mengadukan Saudaranya yang mengalami kecelakaan kejatuhan spanduk baliho	disarankan agar mengajukan surat keberatan untuk memudahkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.	1 hari 15 Januari 2024	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
3	7 Juni 2024	Furqon Rinaldi	085260793376	PKKPR	permohonan PKKPR NU Paralel untuk lokasi Maguwoharjo Depok yang dipersulit dengan beda persyaratan antara yang di aplikasi dengan yang di BPN	agar segera memenuhi persyaratan di BPN	1 hari 7 Juni 2024	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
4	27 Juni 2024	Sutrisno	Jl. Tasura No. 29 Pugeran Maguwoharjo Depok	PBG	Keberatan atas perhitungan retribusi dan denda sanksi administrasi permohonan PBG SLF padahan telah mempunyai IMB sementara dan IMB oleh DPMPTSP	terkait keberatan atas retribusi PBG dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan retribusi PBG setelah DKRD terbit	1 hari 27 Juni 2024	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti
5	21 November 2024	Fauzan, dan Bp Bogi	Perum Kelapa Gading 3 Sukoharjo Condongcatur Depok	pembangunan	pembangunan rumah yang berada di jalan lingkungan dan permohonan informasi IMB an Bp Agus Suroto SHM 1206 di Jl. Pangajabsih Klaseman Sinduharjo Ngaglik	terkait pembangunan yang menutup jalan lingkungan Pangajabsih agar melaporkan hal tersebut ke Bupati Sleman, terkait IMB akan dilakukan pengecekan data perizinan dan akan diinfokan datanya	1 hari 21 November 2024	DPMPTSP	sudah ditindaklanjuti

NO	TANGGAL	PENGADU	Email/Telp	TOPIK	INFORMASI ADUAN	TANGGAPAN/KETERANGAN	WAKTU PENYELESAIAN	OPD TERKAIT	STATUS PENYELESAIAN
I. SURAT MASUK DPMPTSP									
1.	8 Januari 2024	Deni Budi Satria	Bodeh RT 03 RW 24 No. 70 Ambarketawang Gamping	Pengaduan bangunan	Pengaduan atas gangguan bangunan milik tetangga	sudah dikoordinasikan dengan tim aduan dan pemangku wilayah pada tanggal 29 Januari 2024, dan kesimpulan agar dilakukan penyelesaian terlebih dahulu di tingkat wilayah (Padukuhan, Kalurahan, Kapanewon) dengan diberikan surat kepada Kapanewon Gamping Berdasarkan Surat Ka DPMPTSP No. 503/0113 tanggal 2 Februari 2024 Hal Pengaduan Bangunan	15 hari kerja (29 Januari 2024)	DPMPTSP, DPUPKP, SATPOL PP	sudah ditindaklanjuti
2.	17 Januari 2024	Wakijo	Soropadan Mafuwoharjo Depok	Pengaduan Reklame	aduan atas kecelakaan kejatuhan spanduk reklame	sudah dikoordinasikan dengan tim aduan tanggal 29 Januari 2024, dan dikomunikasikan dengan pihak pemilik reklame (PT Lendis), pemilik reklame (PT Lendis) bersedia bertanggung jawab dengna memberikan bantuan dan santunan sebagaimana tertuang dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (pak Wakijo dan PT Lendis) tanggal 24 Februari 2024, ditandatangani Berita Acara Kesepakatan antara Bp Wakijho dengan Bp. Edy Santosa, PT Lendis Media Kreasi	9 hari kerja (29 Januari 2024)	DPMPTSP, DPUPKP	sudah ditindaklanjuti
3.	27 Januari 2024	Galang Prayedha Wartadji Jl. Timor-Timor Perum. SIA XVIII No. AK 24 Sono RT 008/ RW 061 Sinduadi Mlati	Jl. Timor-Timor Perum. SIA XVIII No. AK 24 Sono RT 008/ RW 061 Sinduadi Mlati	Pengaduan bangunan	aduan pembangunan rumah kost/hotel ngawur	sudah dikoordinasikan dengan tim aduan tanggal 13 Februari 2024, dan diberikan surat tanggapan kepada pihak pengadu berdasarkan surat Ka. DPMPTSP No. 503/0157 tanggal 1 Maret 2024 hal, tanggapan, dan kepda pihak pemilik bangunan berdarkan surat Ka DPMPTSP No. 503/0234 tanggal 18 Maret 2024 hal tanggapan	8 hari kerja 13 Februari 2024	DPMPTSP. DPUPKP	sudah ditindaklanjuti
4.	15 Februari 2024	Indah Soewanto	Sidorejo, Hargobinangun, Pakem	aduan kebisingan	Permohonan Action untuk menghentikan suara keras dari Heha Forest View	sudah dikoordinasikan dengan tim aduan tanggal 7 Maret 2024, dan dilakukan tinjau lapangan/pengawasan insidentil pada tanggal 21 Maret 2024. Dan telah diberikan surat Ka DPMPTSP kepada pihak pengadu (Sdr. Indah Soewanto) Nomor 503/0283 tanggal 5 April 2024	16 Hari kerja (7 Maret 2024)	DPMPTSP, SATPOL PP, DPTR, DLH, DPUPKP, DISPAR, KAPANEWON, KALURAHAN	sudah ditindaklanjuti

NO	TANGGAL	PENGADU	Email/Telp	TOPIK	INFORMASI ADUAN	TANGGAPAN/KETERANGAN	WAKTU PENYELESAIAN	OPD TERKAIT	STATUS PENYELESAIAN
5.	18 Februari 2024	Fachrudin Sukarno dkk	Warga Tegalyoso, Banyuraden Gamping	Pengaduan Nilu Cafe	Surat Keberatan atas aktivitas Nilu Cafe berupa live music dan aktivitas yang menimbulkan keresahan serta kebisingan	sudah dikoordinasikan dengan tim aduan tanggal 7 Maret 2024, dan hasil rapat koordinasi untuk penyelesaian permasalahan agar diselesaikan di tingkat wilayah terlebih dahulu, (RT, RW, Dukuh Tegalyoso, Lurah Ambarketawang dan Kapanewon Gamping) dan telah diberikan surat kepada Panewu Gamping dan Lurah Banyuraden berdasarkan surat Ka. DPMPTSP No. 503/0233 tanggal 18 Maret 2024	14 hari kerja (18 Februari 2024	DPMPTSP, SATPOL PP, DISPAR, DLH, DPUPKP, DPTR, KAPANEWON, KALURAHAN, PADUKUHAN	sudah ditindaklanjuti
6.	29 Agustus 2024	Andi Setiawan	jl. Pasa rJmabong Biru trihanggo gamping	live music	aspirasi dan aduan masyarakat terkait aduan kebisingan dari live music angkringan mbok naryo pada jam belajar masyarakat	sudah dikoordinasikan pada tanggal 13 September 2024 dengan hasil DPMPTSP bersurat Nomor 503/0658 tanggal 18 September 2024 ke Panewu Gamping dan Lurah Trihanggo untuk memfasilitasi penyelesaian dengan memediasi antara pemilik usaha dan pengadu tanggal 25 November 2024 dilakukan mediasi oleh lurah Trihanggo, pemilik angkringan mbok naryo bersedia memindahkan panggung	12 hari kerja (13 September 2024	DPMPTSP, SATPOL PP, DPUPKP, DLH, DISPAR, KALURAHAN	sudah ditindaklanjuti
7.	2 September 2024	Yogyakarta Law House	Jl. Shinta No. 27 Karangmloko Sariharjo Ngaglik	mihol/AW	pengaduan aktivitas kegiatan AW yang menimbulkan keresahan, kebisingan dan gangguan ketertiban umum	sudah di rapat koordinasikan oleh Satpol PP tanggal 13 September 2024 dan oleh DPMPTSP tanggal 24 September 2024	10 hari kerja 13 September 2024	DPMPTSP, SATPOL PP, DISPAR, DISPERINDA	sudah ditindaklanjuti
J.	KOTAK SARAN								
1	4 November 2024	no name	KPP	NPWP	untuk pelayanan NPWP ketika kita meminta penjelasan, tolong dijelaskan dengan santai saja tidak usah dengan nada yang tidak enak, kita menjawab sesuai dengan yang kita tahu, dan jika itu tidak sesuai harusnya dijelaskan bukan malah seolah-olah menyalahkan, dan secara tidak langsung mengatakan saya berbohong. tolong untuk mbak-mbak yang bertugas di NPWP tolong jika ada yang tidak paham itu di jelaskan dengan santai, terima kasih	hari berikutnya langsung di koordinasikan dengan loket KPP	2 hari kerja 5 November	DPMPTSP DAN KPP	sudah ditindaklanjuti

NO	TANGGAL	PENGADU	Email/Telp	TOPIK	INFORMASI ADUAN	TANGGAPAN/KETERANGAN	WAKTU PENYELESAI AN	OPD TERKAIT	STATUS PENYELES AIAN
K	TELEPON								
					NIHIL				

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sleman



RETNO SUSIATI S.H., M.M.
Pembina Utama Muda; IV c
NIP. 19650412 1990032011